

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil dan Christin S.T. Cansil, *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Efri Syamsul Bahri. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing. Kediri. 2019.
- Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- M. Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- M. Mahfud M.D., *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

- Marianne Voger dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang*, Manado, 2012.
- Mintarti Indartini dkk, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Penerbit Taujih, Solo, 2019.
- Ni Luh Gede Ambarawati dkk, *Dinamika Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penganggaran Publik*, 2013.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ois M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Totok Mardikanto dan Poerwoo Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung. 2015.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- Yoyo Sudaryo, dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2017.

Jurnal dan Penelitian Sebelumnya

Aminudin, *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. e-Jurnal katalogis, Volume 3 Nomor 12, 2015.

Asmin Patros dkk. *Politik Hukum Demokrasi Kerakyatan Terkait Fungsi Lembaga Legislatif Kota Tanjungpinang*. e-Jurnal katalogis, Vol. 2, No. 1, 2017.

Efi Yulistyowati dkk, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Volume 18, Nomor 2, 2016.

Etih Henriyani, *Pengawasan Masyarakat Dan Kinerja Birokrasi Pemerintah*, Vol. 4, No.1, 2018.

Kantirina Rachaju, *Efektivitas Otonomi Daerah dalam Membangun Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pedesaan*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 21, Nomor 1, 2019.

Riska Firdaus. *Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara*, Jurnal La Galigo, Volume 3, Nomor 1, 2020.

Yulius Dagilaha dkk, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penggunaan Anggaran Daerah Di Era Otonomi*. e-Jurnal katalogis, Volume 9 Nomor 1, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Internet

Abdul Hamied Razak, “Memaksimalkan Fungsi DPRD untuk Mengawal Pemkab Bantul”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/18/511/1145520/memaksimalkan-fungsi-dprd-untuk-mengawal-pemkab-bantul>

Data Presentase Penduduk Miskin Kabupaten bantul oleh BPS <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>

KIM Jembatan Penghubung Pemerintah dan Masyarakat <https://diskominfo.bantulkab.go.id/news/kim-jembatan-penghubung-pemerintah-dan-masyarakat>

Hanung Raharjo. (2023). *Memaksimalkan Fungsi DPRD untuk Mengawal Pemkab Bantul*. Harian Jogja.

Sumber Lain

Ravik Karsidi, Ketua Dewan Riset Daerah Jawa Tengah di Surakarta / Ketua LPM UNS, Pertemuan Koordinasi Penguatan Parlemen, USAID, Jakarta, 2000.